



Judul : Kisruh DPR dan Menteri BUMN  
Tanggal : Senin, 03 Juli 2017  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 6

# Kisruh DPR dan Menteri BUMN

**28 Agustus 2015**

Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelindo II terkait dengan dugaan korupsi pengadaan 10 unit *mobile crane*.

**11 September 2015**

- Komisi VI DPR menyarankan Menteri BUMN Rini Soemarno memecat Dirut PT Pelindo II RJ Lino.
- Menteri Rini menyatakan tak mau buru-buru memecat bos Pelindo itu.

**5 Oktober 2015**

DPR mengesahkan pembentukan Pansus Pelindo II untuk mengevaluasi kasus yang terjadi di Pelindo II.

**18 Desember 2015**

KPK menetapkan RJ Lino terkait dengan dugaan korupsi pengadaan 3 unit *quay container crane*.

## Fungsi Pengawasan DPR

- Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
- Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
- Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
- Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
- Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

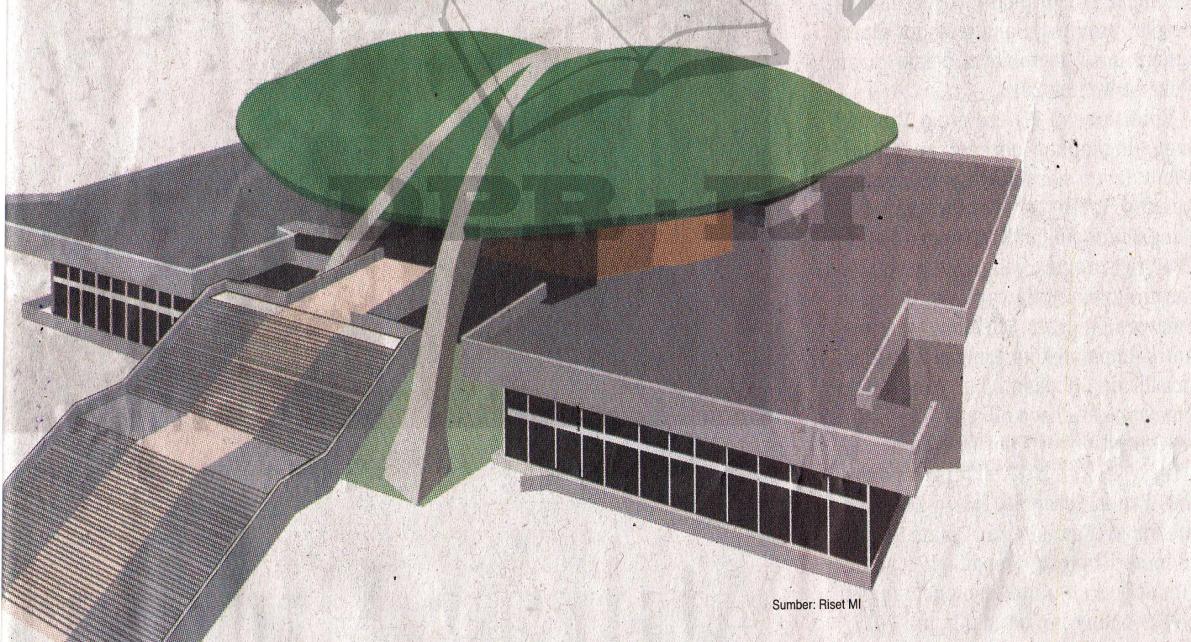
Berdasarkan UU MD3, pansus berwenang memanggil siapa pun, dari warga negara biasa, badan hukum, pejabat pemerintah, hingga pejabat negara, dan bisa memanggil paksa pihak-pihak yang menolak pemanggilan tanpa alasan yang jelas.



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

<b>23 Desember 2015</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pansus Pelindo II menyerahkan rekomendasi ke Sidang Paripurna DPR. Salah satunya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.</li><li>■ Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta oleh Pansus Pelindo II untuk melarang Rini hadir ke DPR.</li></ul>	<b>23 Maret 2017</b> <p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Komisi VI DPR untuk menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno yang masih dilarang menyambangi DPR.</p>
<b>16 Juni 2016</b> <p>Presiden Jokowi menunjuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggantikan Menteri Rini untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas perubahan APBN 2016 dan pembahasan RKA K/L 2017 untuk Kementerian BUMN.</p>	<b>25 Juni 2017</b> <p>Menteri Rini mengatakan dirinya ingin memperbaiki komunikasi dengan Komisi VI DPR.</p>
	<b>1 Juli 2017</b> <p>Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bakal berkoordinasi dengan anggota Komisi VI DPR lantaran komisi tersebut sudah 2 tahun tidak menggelar rapat kerja dengan Menteri Rini Soemarno.</p>



Sumber: Riset MI